

HUBUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STEVANY HANALYNA DETHAN

Fakultas Ekonomi Univ. Mahasaraswati Mataram

e-mail : stevany.hanalyna.dethan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. metode pengumpulan data menggunakan metode kasus. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dengan menggunakan metode indeks (kemampuan keuangan daerah) dan koefisien korelasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB memiliki hubungan yang positif namun lemah dan rendah. Lemah dan rendahnya hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya investasi langsung pada belanja daerah.

Kata Kunci : Kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah harus mampu memberdayakan potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kemampuan daerah. Pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, juga daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sendiri secara konseptual bertujuan menjalankan penyelenggaraan pemerintah lebih efisien dan transparan. Daerah memiliki kekuasaan untuk menjalankan kewenangan sesuai kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Untuk menjalankan semua itu, tentu saja pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus ada keterlibatan dari masyarakat, karena masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak atas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang selayaknya ikut menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.

Implikasi langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan untuk pengeluaran daerah. Untuk itu, perlu adanya peraturan posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kendala umum yang menjadi landasan adalah masalah kemampuan keuangan suatu daerah (*fiscal capacity*). Dari segi ini, banyak daerah otonomi belum mampu memenuhi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di daerah. Sedangkan, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan upaya penegasan langsung kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan fungsinya sebagai pengambil kebijakan pembangunan daerah. Maka dari itu, Undang-undang harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari PAD termasuk bagi hasil pajak, pinjaman maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang paling penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan *ekses* dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Dalam kegiatan

perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infra struktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (PDRB, 2009 : 41).

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/ wilayah/daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai metode dalam meneliti suatu objek atau peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai sifat-sifat hubungan antar fenomena serta dapat ditarik kesimpulan (Nazir, 2005).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kasus. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

Ala analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dengan menggunakan metode indeks (kemampuan keuangan daerah) dan koefisien korelasi.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah maka alat analisis yang digunakan adalah metode indeks diukur melalui Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) (Bappenas, 2003). Untuk mengetahui IKK dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran share, growth dan elastisitas :

$$SharePAD = \frac{PAD_t}{TotalBelanja} \times 100\% \tag{1}$$

$$GrowthPAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \tag{2}$$

$$Elastisitas = \frac{GrowthPAD}{PertumbuhanEkonomi} \tag{3}$$

$$PertumbuhanEkonomi = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \tag{4}$$

Keterangan :

- PAD_t : Pendapatan Asli Daerah tahun t, PAD_{t-1} : Pendapatan Asli Daerah tahun t-1
- PDRB_t : Produk Domestik Regional Bruto t, PDRB_{t-1} : Produk Domestik Regional Bruto t-1

- 2) Menyusun Indeks untuk setiap komponen Indeks Kemampuan Keuangan. Indeks ini diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$\text{Indeks } X = \frac{\text{Nilai } X \text{ hasil pengukuran} - \text{Nilai } X \text{ kondisi minimum}}{\text{Nilai } X \text{ kondisi maksimum} - \text{Nilai } X \text{ kondisi minimum}} \quad 5)$$

- 3) Dari persamaan 5), kemudian dihitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang diperoleh dari persamaan berikut (Bappenas, 2003) :

$$\text{IKK} = \frac{X_S + X_G + X_E}{3} \quad 6)$$

Keterangan :

- X_S : Indeks *Share* PAD terhadap Belanja
- X_G : Indeks *Growth* (Pertumbuhan PAD)
- X_E : Indeks Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- 4) Menyusun peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan IKK yang diperoleh dari persamaan 6). Berdasarkan range IKK tertinggi dan IKK terendah, kemudian disusun peta kemampuan keuangan yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di NTB maka alat analisis yang digunakan yaitu koefisien korelasi. Korelasi mengukur derajat hubungan antara dua atau lebih variabel, koefisien korelasi dihitung dengan formulasi :

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X}_i)(Y_i - \bar{Y}_i)}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X}_i)^2 \sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2}}$$

atau

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{\sum x_i^2 \sum y_i^2}}$$

Dimana :

- r : Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan keuangan daerah.
- X : Kemampuan Keuangan Daerah
- Y : Pertumbuhan Ekonomi

Nilai r berkisar antara -1 dan 1 ($-1 \leq r \leq 1$). Nilai r positif, menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y searah. Nilai r negatif, menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y berlawanan dan jika $r = 0$ menunjukkan antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungan (Chaidir dan Satarudin, 2010: 148).

Lebih rinci lagi kuat lemahnya tingkat atau derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y, secara sederhana dapat dipakai pedoman dibawah ini :

Tabel 1. Derajat Hubungan antara Variabel X dan Variabel Y

Koefisien Korelasi (r)	Hubungan variabel X dan Y
0,00 - < 0,20	Sangat Lemah (Dianggap Tidak ada Korelasi)
0,20 - < 0,40	Lemah dan Rendah
0,40 - < 0,70	Sedang atau Cukupan
0,70 - < 0,90	Kuat atau Tinggi
0,90 - < 1,00	Sangat Kuat atau Sangat Tinggi

Sumber : Chaidir dan Satarudin, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Tabel 2. Indeks Kemampuan Keuangan Pada Sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)

No.	Kabupaten/Kota	X_s	X_G	X_E	IKK	IKK (%)
1.	Lombok Barat	0,4600	0,5129	0,5270	0,5000	50,00
2.	Lombok Tengah	0,6597	0,3876	0,3051	0,4508	45,08
3.	Lombok Timur	0,4840	0,6219	0,6057	0,5705	57,05
4.	Sumbawa	0,5261	0,5269	0,4953	0,5161	51,61
5.	Dompu	0,3600	0,7197	0,6129	0,5642	56,42
6.	Bima	0,4399	0,3483	0,5228	0,4370	43,70
7.	Kota Mataram	0,4707	0,6288	0,6204	0,5733	57,33
8.	Kota Bima	0,3927	0,5327	0,4593	0,4616	46,16
Jumlah		3,7931	4,2788	4,1485	4,0735	407,35
Rata-rata		0,4741	0,5349	0,5186	0,5092	50,92

Sumber : Data Diolah

Tabel 2 dapat menjelaskan bahwa, kemampuan keuangan yang dilihat dengan menggunakan metode indeks, nilai Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah yang paling tinggi adalah Kota Mataram yaitu sebesar 57,33 persen. Hal ini dikarenakan bahwa Kota Mataram sudah dapat meningkatkan PAD, yaitu dengan menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Sedangkan IKK yang paling rendah adalah Kabupaten Bima yaitu 43,70 persen, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bima belum dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Rata-rata IKK pada delapan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebesar 50,92 persen.

Untuk mengetahui hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, maka digunakan koefisien korelasi. Berikut merupakan tabel antara rata-rata kemampuan keuangan daerah dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun anggaran 2004-2008 :

Tabel 3. Kemampuan Keuangan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen).

No.	Kabupaten/Kota	Kemampuan Keuangan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
1.	Lombok Barat	50,00	5,28
2.	Lombok Tengah	45,08	5,12
3.	Lombok Timur	57,05	4,93
4.	Sumbawa	51,61	4,50
5.	Dompu	56,42	3,47
6.	Bima	43,70	4,21
7.	Kota Mataram	57,33	8,16
8.	Kota Bima	46,16	4,50

Sumber : Data Diolah

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa persentase laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Kota Mataram yaitu sebesar 8,16 persen dan sebanding dengan kemampuan keuangan daerah yang paling tinggi juga yaitu sebesar 57,33 persen. Sedangkan persentase laju pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten Dompu yaitu sebesar 3,47 persen, tetapi tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah sebesar 56,42 persen, yang justru berada pada kategori tinggi (dilihat pada pola peta kemampuan keuangan berdasarkan metode indeks). Dimana kemampuan keuangan daerah yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Bima yaitu sebesar 43,70 persen.

Berdasarkan hasil korelasi antara kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebesar 0,33. Dimana dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa antara kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB mempunyai hubungan yang positif, yaitu menunjukkan bahwa hubungan antara kemampuan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi searah. Akan tetapi dari nilai korelasi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan memiliki hubungan yang lemah dan rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi NTB memiliki hubungan yang positif namun lemah dan rendah. Lemah dan rendahnya hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya investasi langsung pada belanja daerah.

Saran-saran

1. Kabupaten/Kota di Provinsi dapat melakukan efisiensi pada sumber daya yang digunakan, yaitu dengan menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong investasi-investasi langsung pada belanja daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- BPS, 2009. *PDRB (Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Chaidir, Taufiq dan Satarudin, 2010. *Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Pertama. Belum Dipublikasikan.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.